

## **Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua Guna Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Merauke**

**Makdika Bismar Marulitua<sup>1</sup>, Oliva Semebe Kahol<sup>2</sup>, Yohanis E Teturan<sup>3</sup>,  
Edoardus E. Maturbongs<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Indonesia  
email: [endesteturan@unmus.ac.id](mailto:endesteturan@unmus.ac.id)

(Diterima Agustus 2024; Disetujui Agustus 2024; Dipublikasikan September 2024)

### **Abstrak**

*Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal khususnya Orang Asli Papua merupakan strategi penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di Papua Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran serta strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan orang asli Papua melalui usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Merauke. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai peran dan strategi yang dapat dijalankan dalam upaya pemberdayaan orang asli melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Merauke dimana sektor ini cukup berperan penting dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan ekonomi. Namun, terdapat juga tantangan-tantangan seperti akses permodalan yang terbatas, kurangnya pendampingan usaha, dan proses pemasaran yang belum tepat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan stakeholder sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Merauke orang asli papua secara berkelanjutan.*

**Kata Kunci :** Orang Asli Papua, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi

### **Abstract**

*The economic empowerment of local communities, especially Indigenous Papuans, is an important strategy in creating economic independence and reducing social inequality in South Papua. This study aims to describe the role and strategy of local governments in empowering indigenous Papuans through micro, small, and medium enterprises in Merauke Regency. The research method uses a qualitative descriptive approach with data collection through observation and documentation studies. The results of the study indicate that local governments have roles and strategies that can be implemented in efforts to empower indigenous people through the micro, small, and medium business sector in Merauke Regency where this sector plays a significant role in opening up employment opportunities and increasing economic income. However, there are also challenges such as limited access to capital, lack of business assistance, and inappropriate marketing processes are still the main obstacles. Therefore, synergy between the government and stakeholders is needed to support the sustainability of micro, small, and medium enterprises in Merauke Regency for indigenous Papuans in a sustainable manner.*

**Keywords:** Indigenous Papuans, MSMEs, Economic Empowerment.

## **PENDAHULUAN**

Harold Laswel dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan -tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik tertentu (Maulana dan Nugroho, 2019). Sejalan dengan defisini tersebut maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu mengangkat derajat kehidupan masyarakat, dimana kebijakan tersebut harus mampu memberikan jalan keluar terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi. Kebijakan tersebut dalam berbagai bentuk seperti peraturan-peraturan maupun program-program, yang pada prinsipnya luarannya adalah untuk kepentingan publik. Salah satu kebijakan yang cukup menarik perhatian pemerintah adalah program terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan ini mempunyai banyak skema, bergantung pada bagaimana ketersediaan sumber daya, salah satunya ada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya (Ondang et al, 2019).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada pasal 1 menyebutkan bahwa “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”, dalam pasal (2) disebutkan bahwa “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”, sedangkan pada pasal (3) menyebutkan bahwa “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu daerah strategis di wilayah timur Indonesia dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang berlimpah ruah. Meskipun demikian, Orang Asli Papua (OAP) masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek peningkatan sosial dan ekonominya. Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Merauke sebanyak 107.112 orang dengan pengangguran terbuka sebanyak 3.869 orang yang jika dirincikan laki-laki sebanyak 1.828 dan perempuan 2.041 (Kabupaten Merauke Dalam Angka, BPS Kabupaten Merauke, 2024). Dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi maka perlu dilakukan upaya kegiatan untuk mengurai angka tersebut, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) dalam rangka memberdayakan masyarakat khusus orang asli Papua (OAP). Data produksi UMKM OAP ini tentu belum semuanya terdata, masih terdapat begitu banyak sentra produksi yang perlu dikaji agar mendapatkan dorongan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan perekonomian OAP.

UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dalam konteks Kabupaten Merauke, pemberdayaan UMKM bagi OAP menjadi suatu langkah strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dilansir dari berita yang menyebutkan bahwa hingga tahun 2022 jumlah UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Merauke berjumlah 3.315 UMKM yang terdiri dari UMKM Mikro sebanyak 2.526, UMKM Kecil 694 dan UMKM Menengah sebanyak 95, dimana dari jumlah itu untuk UMKMOAP masih cukup minim yakni sebanyak 498 atau sekitar 15 persen (<https://www.rri.co.id/merauke/daerah/54176/jumlah-umkm-di-merauke-capai-3.315>). Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah UMKM OAP masih sangat kurang karena banyak faktor yang ikut memberikan dampak didalamnya.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pemberdayaan UMKM OAP antara lain seperti pola pikir masyarakat yang belum melihat peluang usaha dengan begitu melimpahnya sumber daya alam yang dimilikinya, modal usaha yang terbatas sehingga menjadi pemicu ketiadaan modal usaha, serta pemahaman terhadap manajemen pengelolaan UMKM yang terbatas. Sabila dan Wijayang (2019) mengatakan pula bahwa UMKM juga memiliki kelemahan yaitu sulit untuk tumbuh dan berkembang karena usahanya yang selalu stagnan, pasarnya terbatas, dan usahanya yang sulit untuk membesar. Kendala ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberdayaan OAP melalui UMKM. Namun demikian, untuk mewujudkan pemberdayaan yang efektif, perlu dilakukan analisis terhadap bagaimana peran dan strategi terhadap pemberdayaan OAP melalui UMKM dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonominya. Berdasarkan pada sejumlah permasalahan yang telah diurai maka tujuan penelitian ini untuk menggambarkan peran serta strategi pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait dalam pemberdayaan OAP melalui UMKM di Kabupaten Merauke ditengah banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam peningkatan ekonomi OAP melalui kehadiran UMKM.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menurut Creswell sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Murdiyanto, 2019), dengan tujuan peneliti ini yakni mendeskripsikan peran serta strategi pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pemberdayaan orang asli Papua melalui UMKM di Kabupaten Merauke. Data dikumpulkan melalui sumber-sumber yang relevan dalam menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dimana jumlah UMKM OAP masih minim karena juga dipegaruhi oleh banyak faktor, maka dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana peran pemerintah daerah melalui dinas terkait serta strategi yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan OAP melalui UMKM, selain itu untuk melihat hambatan dalam pemberdayaan UMKM OAP sebagai berikut:

### 1) Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan OAP Melalui UMKM

UMKM terbukti menjadi sarana utama dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup OAP. Banyak OAP yang terlibat dalam usaha seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, pertanian lokal, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal tetapi juga menjaga warisan budaya setempat. Dengan kontribusi itu maka pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Merauke mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pemberdayaan OAP melalui UMKM yang dijalankannya. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas teknis antara lain sebagai berikut:

#### 1) Pendataan Sektor UMKM OAP

Pendataan sektor UMKM OAP di Kabupaten Merauke perlu dilakukan pemerintah daerah dengan beberapa pertimbangan, yakni:

- a) Dalam rangka melakukan pemetaan terhadap jenis-jenis dan jumlah usaha yang dilakukan oleh OAP melalui UMKM, pemetaan ini penting untuk mengetahui apa saja keunggulan yang dimiliki oleh UMKM OAP dan bagaimana menumbuhkan UMKM tersebut untuk dapat bersaing dan melebarkan usahanya dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah;
- b) Untuk menganalisis sebaran UMKM OAP di Kabupaten Merauke, hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menginventarisir wilayah-wilayah yang potensial mendapatkan dukungan permodalan terhadap perkembangan usahanya;
- c) Pendataan UMKM guna mengetahui kebutuhan, kendala, dan potensi pengembangan UMKM OAP yang selama ini belum mendapatkan perhatian pemerintah daerah;
- d) Pendataan UMKM ikut menyediakan data yang akurat untuk mendukung intervensi kebijakan terhadap UMKM khususnya UMKM OAP;
- e) Pendataan sebagai dasar dalam pemberian bantuan modal usaha, pelatihan usaha maupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga apa yang diberikan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Proses pendataan ini menjadi penting sebagai data base terhadap aktifitas UMKM OAP tersebut dan sekaligus juga untuk dapat melihat potensi UMKM apa yang cocok dijalankan yang sesuai dengan latar belakang usaha yang ditekuninya sehingga menjadi pegangan bagi pemerintah daerah.

## 2) Pemberdayaan UMKM OAP

Pemberdayaan UMKM OAP yang sudah ada harus terus dilakukan melalui pendampingan usaha, sebab dalam banyak realita yang ditemui sering UMKM tidak berjalan karena kurang adanya pemberdayaan dari pemerintah. Berdasarkan pada pengumpulan data diketahui bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait mulai memberikan ruang bagi UMKM OAP untuk memasarkan produknya pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti pada kegiatan pameran ekonomi kreatif daerah maupun pada seremonial-seremonial tertentu dimana pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi UMKM OAP untuk memasarkan produk-produk unggulannya. Hal ini merupakan terobosan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi keberlangsungan UMKM OAP dalam pelaksanaan aktifitasnya.

## 3) Bantuan Modal Usaha

Modal usaha menjadi penting terutama dalam memulai suatu layananan UMKM, dengan modal usaha yang baik dan transparan akan membuat UMKM OAP berjalan baik pula. Tanpa adanya bantuan modal yang baik maka akan sulit bagi UMKM OAP dapat bertahan terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Namun bantuan modal usaha juga harus memperhatikan kelayakan dari berbagai aspek yang menyangkut administrasi, kelayakan bisnis dan hal lainnya sehingga bantuan modal usaha tidak menjadi sia-sia diberikan oleh pemerintah daerah.

## 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung UMKM perlu dikembangkan dalam rangka memberikan akses terhadap UMKM OAP dalam menyampaikan hasil-hasil produknya. Beberapa masalah yang terjadi dalam pemasaran produk adalah kurangnya sarana prasaran khusus OAP, misalnya masalah pasar mama-mama Papua yang hingga saat ini belum memberikan dampak secara langsung terhadap pemasaran produk yang sebagai akibatnya banyak produk UMKM OAP yang dipasarkan pada tempat yang sedikit kurang layak. Penataan sarana dan prasarana khusus UMKM OAP akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi keberlanjutan program yang mereka jalani.

## 5) Pelatihan dan pendampingan UMKM

Pelatihan dan pendampingan UMKM OAP menjadi langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Pelatihan dan pendampingan lebih diarahkan pada bagaimana mengelola manajemen UMKM seperti manajemen keuangan maupun manajemen pemasaran, sebab hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan secara kontinu maka UMKM OAP akan tumbuh berkembang dengan baik pula.

## 2) Strategi Terhadap Pemberdayaan UMKM OAP

Untuk menumbuhkembangkan UMKM OAP dalam peningkatan ekonominya, beberapa strategi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

### a) Menyediakan dana bergulir dan kredit usaha rakyat bunga rendah

*Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua Guna Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Merauke*

Dana bergulir dan kredit usaha rakyat menjadi salah satu strategi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah melalui dinas terkait dalam pengembangan UMKM OAP yang bekerja sama bersama *stakeholder* contohnya dunia perbankan. Dengan adanya dana bergulir dan kredit usaha rakyat yang sehat maka UMKM OAP akan berkembang dengan baik.

b) Mengadakan pelatihan kewirausahaan berbasis budaya lokal

Pelatihan kewirausahaan berbasis budaya lokal sangat penting dilakukan dalam rangka mengangkat produk-produk budaya lokal yang sangat melimpah. Pelatihan menjadi penting dalam rangka meningkatkan keterampilan UMKM OAP dalam mengelola produk berbahan lokal seperti sagu, umbi-umbian dan sebagainya.

c) Membentuk koperasi atau kelompok usaha bersama berbasis komunitas melalui asosiasi UMKM OAP

Koperasi berbasis usaha bersama berbasis komunitas juga penting, tujuannya salah satu adalah untuk bersaing setidaknya dalam komunitasnya dalam pemasaran hasil-hasil UMKM. Kehadiran asosiasi UMKM OAP juga penting dalam rangka menjembatani kepentingan-kepentingan kelompok usaha tersebut yang terkadang tidak dapat disuarakan, kehadiran asosiasi juga akan membantu mengontrol keberlangsungan usaha dan yang terpenting dapat menjadi wadah bagi aspirasi UMKM OAP.

d) Membuat regulasi daerah terhadap pemberdayaan UMKM OAP

Selayaknya sebuah kebijakan harus mempunyai dasar hukum yang kuat maka dalam pemberdayaan terhadap UMKM OAP perlu kiranya dibuat suatu regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum terhadap pemberdayaan UMKM OAP. Daerah yang mempunyai regulasi ini salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah yang mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Diharapkan dengan adanya regulasi khusus mengenai pemberdayaan UMKM OAP akan membuat pelaku usaha menjadi lebih berkembang.

e) Mengembangkan platform digital untuk promosi produk UMKM

*Platform* digital menjadi salah satu keunggulan ditengah perkembangan teknologi informasi dalam pemasaran produk-produk UMKM OAP, sebab memasarkan produk UMKM melalui metode konvensional akan memakan biaya yang cukup besar sebagaimana dikatakan dalam penelitian terdahulu bahwa promosi dengan metode konvensional memerlukan biaya tinggi (Yusuf dan Mulyono, 2018). Menurut informasi yang dihimpun bahwa strategi ini telah dirintis oleh dinas terkait dalam rangka memasarkan hasil produk UMKM melalui portal-portal tertentu. Untuk dapat memanfaatkan jasa layanan ini maka tentu harus dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi tersebut, agar layanan ini memang benar-benar memberikan dampak dan manfaat terhadap UMKM OAP.

f) *Branding* Produk UMKM OAP

Salah satu persoalan dalam pemasaran produk UMKM adalah belum dikenal oleh masyarakat, Lutfiyani et al (2022) mengatakan permasalahan UMKM salah satunya belum memiliki *brand*. Secara umum *branding* merupakan rangkaian membangun identitas suatu merek produksi

dengan pasar dan konsumen sebagai targetnya. *Branding* terhadap hasil-hasil UMKM OAP perlu dilakukan dengan dukungan dan bantuan pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya yang luas, dengan demikian ketikan UMKM OAP sudah mempunyai *branding* produk yang kuat dan dikenal luas akan membuat UMKM semakin maju berkembang. Banyak fakta membuktikan bahwa UMKM berkembang karena memiliki *branding* produk yang kuat dan terkenal sehingga mendatangkan omset yang sangat besar.

g) Melibatkan perguruan tinggi dalam program pendampingan UMKM

Keterlibatan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat salah satunya melalui pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan institusi pendidikan tinggi dapat menjadi penggerak transformasi sosial-ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi secara teori dan konsep yang di implementasikan kepada sektor UMKM OAP. Universitas Musamus sebagai salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Merauke tentu dapat dilibatkan dalam pemberdayaan UMKM OAP, sebab melalui inkubator bisnisnya diharapkan dapat menjadi modal dalam pemberdayaan terhadap produk lokal yang dibuat. Perguruan tinggi juga dapat menjadi wadah bagi UMKM untuk dapat mendiskusikan hal-hal yang dirasakan dapat berguna bagi keberlangsung UMKM.

h) Monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM OAP

Hal penting lainnya adalah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelangsungan UMKM OAP, hal ini untuk mengupayakan bahwa bantuan biaya yang diberikan memang digunakan sebagaimana mestinya dan untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan sehingga dapat dicarikan alternatif solusinya. Apabila dalam monitoring dan evaluasi ditemukan hal-hal yang menyimpang, dapat menjadi catatan tersendiri bagi kelanjutan jenis usaha tersebut.

### 3) Hambatan Dalam Pemberdayaan UMKM OAP

Beberapa hambatan dalam pemberdayaan UMKM OAP di Kabupaten Merauke antara lain sebagai berikut:

a) Akses permodalan terbatas

Modal menjadi kendala dalam pemberdayaan UMKM OAP, keterbatasan anggaran menjadi hambatan yang umumnya terjadi dalam distribusi bantuan kepada UMKM. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa masalah UMKM di Indonesia hampir sama, salah satunya adalah permasalahan berputar pada akses permodalan yang masih terbatas (Halpiah dan Putra, 2022). Dengan jumlah UMKM yang cukup banyak di Kabupaten Merauke tentu anggaran tidak dapat seterusnya dibagi kepada kelompok-kelompok UMKM semata, masih ada unit-unit lainnya yang memerlukan dukungan anggaran atau modal sehingga dengan demikian menjadi kendala dalam keberlangsungan UMKM.

b) Kurangnya pengetahuan manajerial dan digitalisasi

Kendala lain dalam pemberdayaan UMKM OAP adalah berkaitan dengan pengetahuan manajerial dan digitalisasi, harus diakui bahwa perkembangan teknologi dan informasi saat ini perlu adanya pemahaman manajerial pemasaran yang baik dan digitalisasi terhadap produk-

*Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua Guna Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Merauke*

produk UMKM untuk dapat bersaing dengan memanfaatkan *platform* digital yang ada saat ini. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pemilik UMKM perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait digital marketing yang branding, kemasan, media yang digunakan dan lainnya (Arsi et al, 2023). Jika UMKM OAP tidak siap terhadap tantangan ini maka akan menyebabkan tidak berhasilnya pemberdayaan terhadap UMKM OAP dari sisi pemanfaatan teknologi dan informasi.

c) Minimnya akses pasar dan promosi produk

Akses pasar merupakan ujung dari keberhasilan UMKM dimana pasar menjadi muara dari produk yang dihasilkan, termasuk bagaimana memasuki pangsa pasar tersebut untuk melakukan promosi produk. Hambatan yang kerap kali ditemukan adalah bagaimana masuk dalam pasar dan melakukan promosi terhadap produk UMKM, hal ini sering menjadi penyebab tidak berhasilnya UMKM OAP untuk bersaing dalam memasarkan produk-produknya, sebagaimana penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam UMKM antara lain kurangnya akses pasar dan pemasaran yang masih bersifat konvensional (Lutfiyani et al, 2022).

d) Kurangnya pendampingan dan pelatihan

Hanifah et el (2023) menyebutkan bahwa kegagalan ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan pemilik UMKM akan pengelolaan usaha. Kurangnya pendampingan dan pelatihan dari pemerintah juga menjadi hambatan dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM OAP. Kendala ini disebabkan karena tugas pokok pemerintah daerah sangat luas yang dibarengi dengan kekurangan anggaran untuk pelaksanaan pendampingan dan pelatihan. Berdasarkan hal itulah yang menyebabkan banyak UMKM tidak berkembang dengan baik karena kurang didukung dengan pendampingan yang baik pula dari pemerintah daerah.

e) Jenis usaha yang tidak berkembang

Hambatan lain yang juga terjadi adalah jenis-jenis usaha yang dirintis tidak berkembang karena kurangnya kreatifitas dan inovasi dalam usaha tersebut. Selain itu usahanya terkesan sama dengan UMKM dan tidak memberikan daya tarik bagi konsumen sehingga tidak begitu diminati. Hal ini membuat UMKM seringkali menjadi macet dan bahkan pada beberapa kasus ditutup karena hal-hal tertentu seperti tidak bisa bersaing dengan produk-produk UMKM lainnya.

## KESIMPULAN

UMKM merupakan salah satu sarana yang sangat potensial dalam pemberdayaan ekonomi orang asli Papua di Kabupaten Merauke. Keberadaan UMKM mampu meningkatkan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kearifan lokal melalui berbagai anek produk yang dibuat dan dipasarkan. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah maupun lembaga lainnya lembaga pendidikan tinggi dalam pemberdayaan terhadap UMKM OAP. Strategi yang dikembangkan dalam pemberdayaan UMKM OAP juga harus dijalankan dengan baik sehingga akan mendatangkan nilai tambah dalam

upaya pemberdayaan UMKM tersebut. Beberapa saran dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah perlu membuat regulasi daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap UMKM OAP sebagaimana telah dimulai pada daerah-daerah lainnya;
- 2) Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan bantuan modal bagi UMKM OAP dengan skema tertentu;
- 3) Pemerintah daerah perlu melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM OAP;
- 4) Perlunya promosi berbasis digital terhadap UMKM OAP sehingga mengurangi biaya pemasaran maupun memperluas akses pasar;
- 5) Pelibatan perguruan tinggi dan *stakeholder* lainnya sangat diperlukan dalam memperkuat ekosistem UMKM OAP;
- 6) Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keberlanjutan UMKM OAP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsi, A. A., Melati, L. S., Savitri, D. W., Jatmiko, P. D., Choiriyah, N. L., Damayanti, J. E., Almayda, H. N., Ulfiah, S. A., Thoriq, I. F. A., Fitriyah, M., & Sephiawardani, N. A. (2023). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM di Desa Kutuk. *Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 4, No. 1, April 2023 Hal. 24 – 32.
- Halpiah., & Putra, H. A. (2022). Implementasi Akuntansi Sebagai Strategi Bisnis UMKM. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*. Volume 16 Nomor 2, Halaman 308-321.
- Hanifah, R. U., Rizkiana, C., & Riyanto, S. (2023). Pemberdayaan UMKM Dalam Penerapan Akuntansi Umkm Berbasis Aplikasi Sederhana. *TEMATIK Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.5, No.1, Juni 2023, pp. 107 – 112.
- <https://www.rii.co.id/merauke/daerah/54176/jumlah-umkm-di-merauke-capai-3.315>
- Kabupaten Merauke Dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, 2024.
- Lutfiyani, I. Q., Hastadi, A. Y., Wahyuningsih, F., Wahyuni, A. T., Fauzi, G. F. ,Nurfaizah, A., Mustofa, Rohimah, T., & Yanuar, R. (2022). Pengembangan UMKM Melalui Optimalisasi Branding dan Penggunaan Media Digital di DesaS indangbarang, Kabupaten Cilacap. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarat*, April 2022, Vol 4 (1) 2022 : 70–84.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik. Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Kota Serang: CV. AA. Rizky.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM). *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Volume 3 No. 3 Tahun 2019.

Sabilla, S. O., & Wijayangka, C. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Pada Umkm. *Almana : Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 3 No. 1/ April 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Yusuf, M., & Mulyono, H. (2018). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Promosi Berbasis Web Pada Asosiasi UMKM Muaro Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, Vol 3. No. 1 Maret 2018.